

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara ialah melalui pelaksanaan pada bidang pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Oleh karena itu, berbagai unsur Pendidikan harus saling berkoordinasi dalam pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan secara optimal terutama dalam Pendidikan formal.

Lembaga Pendidikan Formal merupakan sebuah lembaga penentu dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan, sekolah sebagai pelaksana dari semua program pendidikan yang direncanakan dari tingkat

¹ UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 3

pusat sampai ke tingkat operasional di sekolah. Berhasil atau tidaknya sebuah Lembaga Pendidikan Formal dalam mencapai tujuan Pendidikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu para *stakeholders* yang terlibat seperti guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, kemudian dari segi pembelajaran yang terdiri dari berbagai komponen seperti kurikulum, silabus, RPP, serta media dan metode pembelajaran yang digunakan selama proses kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam prosesnya pendidikan harus memberi layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Salah satu komponen yang cukup penting dalam pendidikan ialah kurikulum, kurikulum merupakan suatu perangkat yang disiapkan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, sejalan dengan isi dari UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, maka dalam prosesnya upaya pemerintah untuk mencapai hal tersebut ialah dengan terus mengembangkan kurikulum. Pengembangan dilakukan dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan disesuaikan

² UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1

relevansinya sesuai perkembangan zaman dan IPTEK. Selain itu dalam pengembangannya, kurikulum juga seharusnya memperhatikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Seperti yang tercantum pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.³

Pelaksanaan sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki dua sistem yaitu sistem paket dan sistem kredit semester. Pada umumnya pendidikan formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah, saat ini menggunakan sistem paket. Dengan sistem paket, peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.⁴ Digunakannya sistem paket ini dianggap kurang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Karena kecepatan belajar pada tiap siswa berbeda-beda. Hal tersebut selaras dengan prinsip belajar yang dikemukakan oleh Davies yang dikutip oleh Husamah yaitu siswa belajar menurut tempo kecepataannya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi

³ UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 12

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, hal. 39

kecepatan belajar.⁵ Sehingga dibutuhkan layanan Pendidikan yang dapat mengakomodir kecepatan belajar siswa yang bervariasi. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk mengelola pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun ruang lingkup otonomi sekolah yaitu pemerintah memberikan kewenangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada sekolah dan guru untuk bekerja sama dalam merancang proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik agar dapat belajar dengan lancar dan berhasil melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk itu, sebagai upaya dalam mengakomodasikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya maka pemerintah sejak tahun 2007 menyelenggarakan layanan penyelenggaraan sistem kredit semester.

"Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester."⁶

Permendiknas di atas menjelaskan bahwa semua jenis dan jenjang sekolah dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester.

⁵ Husamah,dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Malang:UMM Press, 2018), hlm.16

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, *loc.cit.*

Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan/atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya.⁷ Melalui penerapan SKS ini dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.⁸ Berbeda dengan sistem paket, beban belajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS) lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Siswa yang memiliki kecepatan belajar tinggi dapat menuntaskan materi lebih cepat dan mendapat peluang untuk melanjutkan belajarnya pada topik berikutnya secara berkelanjutan tanpa harus menunggu teman sekelompok menyelesaikan program belajarnya terlebih dahulu. Sekolah memberikan pelayanan pada kelompok tengah dengan program pengayaannya, dan pada kelompok bawah dengan remedialnya. SKS memberikan peluang belajar kepada seluruh peserta didik layanan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester merupakan salah satu sistem penerapan program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, hal. 3.

⁸ BSNP, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, 2010, hlm. ii

peserta didik belajar. Peserta didik diberi kebebasan untuk merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan, dan harapan masing-masing.⁹

Program SKS sangat penting karena memfasilitasi peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau anak berbakat. Peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau anak berbakat memiliki kecepatan dalam belajar sehingga dapat menyelesaikan program belajarnya lebih cepat. Hal ini juga dijelaskan oleh Zuraida dan Totok yang saya kutip dari skripsi Nafia “dengan diselenggarakan kelas program SKS ini juga memungkinkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan, yaitu program pendidikan dapat diselesaikan dalam waktu tercepat 2 tahun”.¹⁰

Dengan diselenggarakannya SKS di sekolah dapat membantu peserta didik yang memiliki kecepatan belajarnya di atas rata-rata serta memungkinkan untuk menyelesaikan program belajarnya kurang dari 3 tahun atau 4 semester.

“Dalam implementasi SKS, proses pendidikan diprogramkan agar setiap peserta didik dapat belajar lebih efisien sehingga lama belajarnya bisa kurang dari 6 (enam) semester dengan cara menyelesaikan penguasaan setiap/seluruh mata pelajaran lebih cepat.

⁹ Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), hal. 363

¹⁰ Mukhammad Ilman Nafia, Skripsi: “*Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA 1 Kudus*”, (Semarang: UNNES, 2017), hlm. 5

Bagi peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai waktu belajar yang tersedia (8 semester) harus tetap difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam Kurikulum.¹¹

Penyelenggaraan pendidikan dengan layanan SKS yang dijalankan sejak tahun 2007 mengalami perubahan sejak diberlakukannya SKS dengan sistem yang dikembangkan terbaru. Pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA, bila sebelumnya SKS terdahulu menerapkan kelas homogen yaitu penempatan peserta didik dengan pengelompokan berdasarkan beban belajar yang diambilnya yaitu program 2 tahun dan program 3 tahun. Pada kelas homogen, tiap-tiap kelas diisi oleh siswa yang mengambil program semester yang sama. Perbedaannya dengan SKS baru ialah, diterapkannya kelas heterogen yang menjadikan siswa dengan program 2 tahun ataupun 3 tahun berada dalam satu ruangan kelas yang sama. Penerapan SKS pada SMA dengan sistem yang terbaru, diberlakukan sejak tahun 2017.

Dalam jurnalnya Desi Rostika dan Wildan Zulkarnain, mengemukakan bahwa:

“dampak implementasi kurikulum 2013 dengan SKS di SMA Negeri 1 Batu terhadap siswa ini memberikan dampak positif pada aspek psikologis siswa, dimana mereka enjoy (santai) dan bersemangat dan lebih leluasa untuk menyelesaikan studi sesuai dengan kemampuan belajarnya. Tidak adanya kenaikan kelas membuat peserta didik tidak merasa tertekan. Selain itu terdapat kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan yaitu adanya sebagian guru yang masih belum siap sehingga menjadi beban tersendiri, beberapa guru senior

¹¹ Direktorat Pembinaan SMA, *Pedoman Penyelenggaraan SKS d SMA*, 2017 hlm.6

yang belum paham mengenai penggunaan Teknologi Informasi, dan masih ada guru yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Kurikulum 2013.¹²

Penerapan SKS di SMA menuntut guru untuk siap dalam proses pembelajaran di kelas, berhasil atau tidaknya tujuan dari penerapan SKS ialah peran dari seorang guru. Selain itu guru dituntut untuk dapat menggunakan Teknologi Informasi dalam menunjang proses pembelajaran SKS sehingga peserta didik dapat difasilitasi dengan baik.

Salah satu sekolah pelaksana SKS sejak pertama kali ialah SMA Negeri 78 Jakarta. SMAN 78 menjadi sekolah percobaan pertama yang menerapkan SKS dari semua SMA di Jakarta.¹³ Dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1383 Tahun 2017 sekolah ini menyelenggarakan SKS dengan sistem yang baru hingga saat ini. Sebagai sekolah pelaksana SKS pertama ternyata tak dipungkiri masih ditemukan banyak kendala khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran SKS. Berdasarkan hasil wawancara pada *grand tour* yang peneliti lakukan dengan bapak Ridnan selaku Wakil Kurikulum di SMA Negeri 78, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan SKS masih terdapat kekurangan, seperti dalam kegiatan belajar di kelas, guru harus melayani dalam satu waktu dua kelompok yang berbeda,

¹² Desi Rostika dan Wildan Zulkarnain, "Analisis Implementasi Kurikulum 2013 Dengan Sistem Kredit Semester Jurnal Manajemen Pendidikan", Vol 25, NO.2 (UNM; Malang, 2016) hlm.193-194

¹³ Latief, "Kenali Sistem Kredit Semester", www.kompas.com, 15/04/2011, <https://edukasi.kompas.com/read/2011/04/15/12410488/Kenali.Sistem.Kredit.Semester>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 12.53 WIB

sehingga yang dirasakan pembelajarannya waktunya kurang, kendala berikutnya tentang pengaturan pembelajaran, yang mana terdapat dua kelompok yang berbeda percepatan belajarnya dan semua harus difasilitasi dengan baik.¹⁴ Hal ini menjadi penting karena, terlaksananya pembelajaran yang baik tentunya akan berdampak pula terhadap tercapainya tujuan pembelajaran.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan juga fakta bahwa meskipun masih terdapat kendala, penerapan SKS di SMA Negeri 78 tergolong berhasil karena berhasil mewedahi bakat siswa dengan kecepatan belajar lebih tinggi sehingga dapat lulus dengan program 2 tahun. SMA Negeri 78 menjadi satu-satunya penyelenggara SKS di Jakarta yang berhasil meluluskan peserta didik dengan sistem SKS yang baru, yaitu sebanyak 26 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Peneliti ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Manajemen Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester khususnya di SMA Negeri 78, bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga berhasil mengatasi kendala yang dihadapi. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.”

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ridnan Wakil Kurikulum SMAN 78 Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2019

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi fokus penelitian yaitu: Manajemen Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta. Adapun subfokus dari penelitian ini yaitu :

1. Perencanaan Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.
2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.
3. Evaluasi Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka pertanyaan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta?
3. Bagaimana Kegiatan Evaluasi Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian, maka secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui proses perencanaan Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.
2. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.
3. Mengetahui bagaimana proses kegiatan evaluasi Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 78 Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengembangan teori-teori kebijakan pendidikan khususnya mengenai Manajemen Kurikulum Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA.

2. Secara Praktis

a. Bagi Sekolah

Bagi pihak sekolah untuk dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester selanjutnya.

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masalah yang terjadi dalam penerapan SKS yang ada di sekolah.

b. Bagi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam serta gambaran riil tentang bagaimana penerapan SKS berjalan. Dapat menjadi contoh bagaimana penerapan SKS yang baik dan benar, dan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kebijakan khususnya tentang manajemen di tahun yang akan datang demi tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pendidikan.

c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mendapat informasi baru mengenai pengetahuan tentang proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Kurikulum berbasis SKS khususnya di Sekolah Menengah Atas.